

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kajian teori tentang manajemen keuangan di sekolah dasar yang relevan selama penelitian berlangsung, peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari penelitiannya sebagai berikut :

1. Bahwa kebijaksanaan Kepala Sekolah Dasar di tiga lokasi telah berusaha melakukan Strategi pengelolaan keuangan sekolah dengan melakukan berbagai upaya kajian sejak rancangan tentang RAPBS, dengan menggunakan analisis SWOT dan melakukan tahapan manajemen keuangan formal untuk memenuhi ketentuan administrasi keuangan semata. Bahwa tahapan penyusunan RAPBS hingga menjadi APBS telah dilakukan sesuai prosedur, tetapi dalam keakuratan sebuah rencana anggaran masih kurang tepat, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh sumber dana dari pemerintah tidak dapat diketahui secara pasti sejak awal, sedangkan sumber dana dari orang tua tidak masuk 100%. Target dana dari masing-masing sumber adalah seperti dalam grafik 4.4. Pendekatan dalam penyusunan rencana budget di ketiga sekolah ini lebih mendekati pola *Planning Programming Budgeting System (PPBS)* walaupun *Line Budget System* digunakan juga.
2. Bahwa implementasi pengelolaan keuangan di Sekolah Dasar Lokasi penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan program

pendidikan di sekolah masing-masing dan merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah dengan memenuhi kebutuhan dana untuk komponen-komponen kegiatan yang tercantum dalam RAPBS yaitu : Peningkatan Proses KBM, Pemeliharaan dan Penggantian Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pembinaan Kegiatan Kesiswaan, Kesejahteraan Pegawai, Rumah Tangga Sekolah dan Biaya Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan. Bahwa alokasi anggaran untuk tiap komponen pengeluaran tidak merata dan masih terlalu kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar

3. Bahwa sumber utama pembiayaan pendidikan di SDN lokasi penelitian hanya berasal dari orang tua murid dan pemerintah, tidak ditemukan data adanya sumber biaya dari masyarakat atau usaha lain yang dilakukan sekolah. Oleh karena itu peran serta orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan khususnya untuk kegiatan rutin di luar gaji cukup besar. Kenyataan lain menunjukkan bahwa sumber keuangan SDN perkotaan (diluar gaji) sebagian besar berasal dari orang tua murid, pada SDN marginal kota desa adanya keseimbangan sumber keuangan antara orang tua murid dan pemerintah, sementara pada SDN pedesaan khususnya desa tertinggal peran sumber keuangan dari pemerintah cukup dominan dan dari orang tua hanya sebagian kecil saja.
4. Bahwa sumber keuangan dari pemerintah terdapat beberapa jenis bantuan digunakan untuk membiayai sebagian komponen pembiayaan pendidikan

yang diperlukan sesuai peruntukannya, sedangkan sumber keuangan dari BP3 digunakan secara merata untuk semua komponen kegiatan pendidikan yang membutuhkan biaya.

5. Hambatan utama yang dihadapi para kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan di SDN adalah terbatasnya sumber-sumber dana yang ideal. Peraturan pengelolaan keuangan dirasakan terlalu kaku dan jelimet, sumber dana dari pemerintah yang berbeda-beda dirasakan mempersulit pekerjaan tata usaha keuangan yang dapat mengganggu konsentrasi kepala sekolah dalam menangani tugas-tugas kependidikan. Perbedaan awal tahun anggaran dengan awal tahun ajaran menyebabkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja di sekolah dasar tidak akurat.
6. Bahwa kontribusi APBS terhadap proses belajar mengajar di kelas masih terlalu kecil dan bahkan di SDN pedesaan hanya sebesar 33,99% saja dari RAPBS yang digunakan langsung pada peningkatan mutu proses belajar mengajar.
7. Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan, tetapi hanya ditangani oleh kepala sekolah. Dirasakan pula longgarnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dari pihak yang berwenang, pengawasan keuangan sering kali lebih bersifat formalistik semata.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan model atau kajian oleh para kepala sekolah dan pengelola pendidikan tingkat dasar dalam upaya meningkatkan

yang diperlukan sesuai peruntukannya, sedangkan sumber keuangan dari BP3 digunakan secara merata untuk semua komponen kegiatan pendidikan yang membutuhkan biaya.

5. Hambatan utama yang dihadapi para kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan di SDN adalah terbatasnya sumber-sumber dana yang ideal. Peraturan pengelolaan keuangan dirasakan terlalu kaku dan jelimet, sumber dana dari pemerintah yang berbeda-beda dirasakan mempersulit pekerjaan tata usaha keuangan yang dapat mengganggu konsentrasi kepala sekolah dalam menangani tugas-tugas kependidikan. Perbedaan awal tahun anggaran dengan awal tahun ajaran menyebabkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja di sekolah dasar tidak akurat.
6. Bahwa kontribusi APBS terhadap proses belajar mengajar di kelas masih terlalu kecil dan bahkan di SDN pedesaan hanya sebesar 33,99% saja dari RAPBS yang digunakan langsung pada peningkatan mutu proses belajar mengajar.
7. Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan, tetapi hanya ditangani oleh kepala sekolah. Dirasakan pula longgarnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dari pihak yang berwenang, pengawasan keuangan sering kali lebih bersifat formalistik semata.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan model atau kajian oleh para kepala sekolah dan pengelola pendidikan tingkat dasar dalam upaya meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah khususnya di sekolah dasar dengan arah peningkatan mutu proses belajar mengajar.

Temuan penelitian ini juga, diharapkan dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan anggaran pendidikan bagi sekolah dasar terutama pada era otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan dan penerapan konsep *School-based Management* dan *School and Community Based Education*.

C. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal untuk :

1. Rekomendasi untuk kepentingan praktis
 - a. Perlu adanya pembinaan khusus bagi para kepala sekolah dasar dalam pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah sejak tahap penyusunan RAPBS dalam rangka meningkatkan keakuratan dan ketepatan rencana anggaran dan peningkatan akuntabilitas manajerial keuangan sekolah yang transparan serta diharapkan akan dapat meningkatkan peran serta stakeholders sekolah dalam pendanaan pendidikan.
 - b. Karena tugas-tugas kepala sekolah dasar begitu banyak dan luas dan agar tidak campur aduknya pekerjaan yang bersifat edukatif dan administratif, perlu ada staf khusus yang membantu kepala SD dalam menangani tugas-tugas ketatausahaan sekolah termasuk tata usaha keuangan. Dengan adanya staf tata usaha sekolah maka akan dapat

menghindarkan kesan penerapan pola “ Ngeupeul ngahuapan maneh” dalam manajemen keuangan sekolah yang selama ini dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar.

- c. Pencarian dana pendidikan hendaknya diaktifkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di lingkungan sekolah dan masyarakat umum, termasuk tokoh agama terutama agar ada penyisihan anggaran dari hasil Zakat, Infaq dan Sodaqoh untuk pendidikan.
- d. Perlu ada pengaturan khusus dengan penerapan satu kebijaksanaan dalam pelaksanaan kucuran bantuan biaya ke SD, karena selama ini jenis bantuan seperti SBPP, DOP, DBO atau bantuan lain dari pemerintah terkesan pola pengaturannya masing-masing dan tidak terkoordinasi, sehingga menyulitkan pengelolaan pada tingkat sekolah. Dana dari pemerintah sebaiknya di *Block Grant* kan saja
- e. Mengingat kenyataan lapangan tentang kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dasar sangat rendah, maka perlu ada kebijakan pada tingkat Pemerintah Kabupaten untuk memperbesar bantuan biaya ke SDN yang bersumber dari dana masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara mandiri antara lain melalui : 1) Melibatkan para alumni yang berhasil dalam dewan sekolah khususnya penadaan pendidikan. 2) Gerakan Tabungan siswa mulai tingkat SD/MI, SLTP/MTs sampai SMU/SMK MA yang terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dengan menjalin kerja sama dan melibatkan sepenuhnya pihak Bank yang terpercaya. Penyetoran

tabungan dilakukan setiap bulan dan dikembalikan kepada siswa tatkala siswa keluar dari setiap tingkatan pendidikan. 3) Adanya iuran masyarakat untuk pendidikan secara periodik yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah serta dikukuhkan dengan persetujuan DPRD Kabupaten. Iuran bisa dilakukan bersamaan dengan pembayaran listrik, air atau telepon dan atau penambahan angka dalam Pajak Bumi dan Bangunan. 4) Perlu dikembangkan pola pembiayaan mandiri pada sekolah-sekolah tertentu dengan memberikan kesempatan kepada Kepala SD untuk mencari sumber-sumber biaya pendidikan di luar pemerintah dan orang tua murid, antara lain dengan pemberian ijin penggarapan lahan-lahan yang tidak produktif milik pemerintah untuk atas nama sekolah.

- f. Perlu disediakan anggaran khusus oleh pemerintah kabupaten untuk imbal swadaya masyarakat (*matching grant*), dalam rangka memancing peran serta masyarakat dalam membantu keuangan sekolah dasar. Dana ini hanya diberikan kepada sekolah yang mendapatkan bantuan dari masyarakatnya.
- g. Perlu ditingkatkan pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan keefisienan pembiayaan sekolah. Mengingat banyaknya lembaga sekolah maka sebaiknya ada pejabat fungsional tingkat kabupaten yang bertugas sebagai akuntan keuangan sekolah.

2. Rekomendasi untuk kepentingan penelitian ke depan, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penelitian tentang korelasi besar kecilnya penganggaran kegiatan dalam APBS dengan mutu out put (lulusan) sekolah.
- b. Perlu ada penelitian lebih lanjut dan luas tentang efisiensi dan efektivitas pembiayaan di Sekolah dasar Negeri dengan membandingkan pola satu rombongan belajar tiap tingkatan dalam satu sekolah dengan banyak rombongan belajar pada tiap tingkatan dalam satu sekolah.
- c. Perlu ada penelitian eksperimen terhadap pola pembiayaan mandiri dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat pemilik dan pengguna pendidikan sebagai respon atas konsep *School-based Management* dan konsep *School and Community Based Education* yang akan dikembangkan dalam era otonomi pemerintahan daerah termasuk didalamnya uji coba otonomi pendidikan.